

**PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO  
BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) TERHADAP  
USAHA PETANI DI KABUPATEN CILACAP (STUDI  
KASUS : KECAMATAN CILACAP TENGAH)**



**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)  
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :  
**MUSTIKA INDRA KUSUMA**  
**NIM. C2B 008 053**

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2015**

## **PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Mustika Indra Kusuma  
NIM : C2B008053  
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP  
Judul Skripsi : **PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN  
MIKRO BAITUL MAAL WAT TAMWIL  
(BMT) TERHADAP USAHA PETANI DI  
KABUPATEN CILACAP (STUDI KASUS :  
KECAMATAN CILACAP TENGAH)**

Dosen pembimbing : Darwanto, S.E., M.Si.

Semarang, 25 Februari 2015

Dosen pembimbing,

(Darwanto, S.E., M.Si.)

NIP. 197808112008121002

## **PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN**

Nama Mahasiswa : Mustika Indra Kusuma  
NIM : C2B008053  
Fakultas / Jurusan : Ekonomika dan Bisnis / IESP  
Judul Skripsi : **PEMBIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN  
MIKRO BAITUL MAAL WAT TAMWIL  
(BMT) TERHADAP USAHA PETANI DI  
KABUPATEN CILACAP (STUDI KASUS :  
KECAMATAN CILACAP TENGAH)**

**Telah dinyatakan lulus pada tanggal 31 Agustus 2015**

Tim Penguji

1. Darwanto, SE, M.Si (.....)
2. Dr. Nugroho, SBM, M.si (.....)
3. Arif Pujiyono, SE, M.si (.....)

Mengetahui,  
Pembantu Dekan I,

Anis Chariri, SE, M.Com.Ph.D, Akt  
NIP. 196708091992031001

## **PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Yang bertandatangan dibawah ini saya, Mustika Indra Kusuma, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: “Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Baitul Mal Wa’ Tamwil (BMT) Terhadap Usaha Petani di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus : Kecamatan Cilacap Tengah)” adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai tulisan hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 10 Februari 2015  
Yang membuat pernyataan,

(Mustika Indra Kusuma)  
NIM : C2B008053

## ***Abstract***

*Cilacap is one area in Central Java are predominately working as a farmer. The problem often faced by farmers is that they are constrained by the marketing problem yields, and low product prices when the harvest. Farmers in Cilacap have to sell their produce to middlemen at a price below the market price. Farmers need institutions that can help their businesses. BMT as sharia-based microfinance institutions have important objectives related to the vision of helping the weak sector. It is therefore necessary to design BMT financing services needed by farmers. Revenue sharing system in Islamic Economics suitable for farmers that musharakah system, namely the cooperation between two or more parties to a particular business ne where maing each party contributes funds to an agreement that the benefits and risks in joint responsibility. This study aims to determine service what is the islamic financial institutions that may be provided to help farmers, any obstacles that arise in them and how to solve them. The method used in this study use a qualitative method using a case study approach. This study found the Islamic financial institutions can assist farmers in solving problems from the sale of crops with revenue sharing system between the giver and receiver BMT capital or capital or farmers or commonly called musharakah contract.*

*Keywords : microfinance institutions, the Baitul Maal wat tamwil, social capital, and shariah contract*

## **Abstraksi**

Cilacap merupakan salah satu wilayah di daerah Jawa Tengah yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Permasalahan yang sering dihadapi petani adalah mereka terkendala oleh masalah pemasaran hasil panen, dan harga produk yang murah ketika panen. Para petani di Cilacap harus menjual hasil panennya kepada para tengkulak dengan harga di bawah harga pasar. Petani membutuhkan lembaga yang yang mampu membantu usaha mereka. BMT sebagai lembaga keuangan mikro berbasis syariah mempunyai tujuan penting terkait visi membantu sektor usaha yang lemah. Oleh karena itu BMT perlu mendesain pelayanan pembiayaan yang dibutuhkan petani. Sistem bagi hasil dalam Ekonomi Islam yang cocok untuk petani yaitu sistem musyarakah, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk uatu usaha tertentu di mana maing masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko di tanggung bersama. Penelitian ini bertujuan mengetahui pelayanan apa saja yang ada dalam lembaga keuangan syariah yang dapat disediakan untuk membantu petani, kendala apa saja yang timbul di dalamnya dan bagaimana cara menyelesaikannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini memakai metode kualitatif dengan memakai pendekatan studi kasus. Penelitian ini menemukan lembaga keuangan syariah dapat membantu petani dalam menyelesaikan masalah hasil penjualan hasil panen dengan sistem bagi hasil antara pemberi modal atau BMT dan penerima modal atau petani atau yang biasa disebut akad musyarakah.

Kata kunci : lembaga keuangan mikro, baitul maal wat tamwil, modal sosial, dan akad syariah

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, kasih sayang serta kemurahan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Baitul Mal Wa’ Tamwil (BMT) Terhadap Usaha Petani di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus : Kecamatan Cilacap Tengah)” dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini banyak pihak yang telah memberikan bimbingan, bantuan, dorongan dan doa baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Dr. Suharnomo selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Ibu Nenek Woyanti S.E., M. Si., selaku dosen wali yang telah memberikan segala bimbingan, arahan, dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Darwanto S.E., M.Si. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan segala arahan, bimbingan, petunjuk, dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Nugroho. SBM, M.Si. selaku dosen penguji yang telah bersedia menguji skripsi saya dan telah memberikan tanda tangan setelah revisi.
5. Bapak Arif Pujiyono, SE, M.Si selaku dosen penguji yang telah bersedia menguji skripsi sya dan telah memberikan tanda tangan setelah revisi
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Jurusan IESP yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan banyak ilmu yang sangat berharga.
7. Orang tua tercinta (Slamet Prihadi. dan Ani Susanti) yang telah memberikan luapan kasih sayang, doa, bimbingan, dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Adik tercinta Sukmaningrum Sekar Arum yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
9. Om Sugeng dan Tante Aris yang selalu memberikan dukunga moral serta pembelajaran yang bermanfaat bagi penulis.
10. Om Isnu dan Tante Titin yang telah memberikan tempat tinggal selama penulis menempuh pendidikan di UNDIP Semarang.

11. Pengurus Baitul Maal Wat Tamwil Al Mujahidin yang telah bersedia memberikan informasi yang berguna bagi penelitian ini.
12. Pengurus Baitul Maal Wat Tamwil Khonsa yang telah bersedia memberikan informasi yang berguna bagi penelitian ini.
13. Pengurus Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Bersama yang telah bersedia memberikan informasi yang berguna bagi penelitian ini.
14. Prihastomo Puji Laksono yang selalu menjadi teman setia dalam suka dan duka serta selalu memberikan dukungan kepada penulis.
15. Andi Pramana yang selalu menjadi teman setia dalam suka dan duka serta selalu memberikan dukungan kepada penulis.
16. Wulan Sutriandari yang dengan setia menemani serta memberikan dukungan kepada penulis dalam proses penelitian ini.
17. Riska Apriliana yang selalu memberikan dukungan dan support kepada penulis serta dengan ikhlas membantu dalam proses penelitaian ini
18. Teman teman IESP 2008, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, terimakasih banyak atas semangat, suka duka, kekompakan, tangis tawa yang kalian berikan.
19. Teman teman KKN Desa Karangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya.
20. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, termasuk seluruh responden yang telah banyak membantu dalam memberikan data terimakasih atas segala bimbingan serta doanya.

Semarang, Februari 2015

Mustika Indra Kusuma

C2B008003

## Daftar Isi

Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan Skripsi .....	ii
Halaman Pengesahan Kelulusan Ujian .....	iii
Pernyataan Orientasi Skripsi .....	iv
Abstract .....	v
Abstraksi .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi .....	ix
Datar Tabel .....	xi
Daftar Gambar .....	xii
Daftar Lampiran .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
1.4 Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Landasan Teori .....	10
2.2 Kajian Pustaka .....	20
2.3 Penelitian Terdahulu .....	24
2.4 Lembaga Keuangan Mikro Internasional.....	30
2.5 Pengertian Modal Sosial .....	32
2.6 Peranan Modal Sosial Terhadap Lembaga Keuangan Mikro .....	34
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	35
3.2 Model Penelitian .....	36
3.3 Konsep Dasar Penelitian .....	36
3.4 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.5 Konsep Reliabilitas dan Validitas dalam Penelitian Kualitatif.....	38

3.6 Jenis dan Sumber Data.....	40
3.7 Tahap Pengolahan Data .....	41
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Cilacap .....	42
4.2 Baitul Maal Wat Tamwil Al Mujahidin.....	45
4.3 Baitul Maal Wat Tamwil Khonsa .....	55
4.4 Baitul Maal Wat Tamwil Usaha Bersama .....	66
4.5 Peranan Modal Sosial dalam Membantu LKM Syariah .....	81
4.6 Mengapa Perlu Ada Baitul Maal Wat Tamwil di Cilacap .....	83
4.7 Sudahkah BMT Membantu Petani di Cilacap .....	84
4.8 Hubungan Modal Sosial Dengan Penelitian Mengenai LKMS .....	85
4.9 Fakta Yang Dapat Diungkapkan Dalam Penelitian Ini.....	86
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
5.1 Kesimpulan .....	87
5.2 Keterbatasan .....	87
5.3 Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>

## Daftar Tabel

Tabel 1.1 Rata-rata Luas Lahan yang dikuasai per Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kecamatan dan Jenis Lahan di Kabupaten Cilacap Tahun 2013 (M2) .....	5
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	24
Tabel 4.1 Data Jumlah Piutang BMT Al Mujahidin Per Agustus 2014 .....	51
Tabel 4.2 Jumlah Anggota di BMT Al Mujahidin .....	54
Tabel 4.3 Data Jumlah Piutang BMT Khonsa Per Agustus 2014.....	63
Tabel 4.4 Jumlah Anggota di BMT Khonsa .....	66
Tabel 4.5 Data Jumlah Piutang BMT Usaha Bersama Per Agustus 2014 .....	75
Tabel 4.6 Jumlah Anggota di BMT Usaha Bersama .....	77
Tabel 4.7 Pembiayaan BMT Yang Sesuai Untuk Petani di Cilacap .....	79
Tabel 4.8 Permasalahan dan Langkah Lembaga Keuangan Syariah Untuk Membantu Petani di Cilacap .....	80
Tabel 4.9 Tabel Jumlah Koperasi dan Baitul Maal Wat Tamwil Posisi Per Triwulan per 1 Tahun 2014 (31 Maret 2014) .....	81

## **Daftar Gambar**

Gambar 4.1 Areal Pertanian Kabupaten Cilacap .....	43
Gambar 4.2 BMT Al Mujahidin .....	46
Gambar 4.3 BMT Khonsa.....	56
Gambar 4.4 BMT Usaha Bersama .....	72
Gambar 4.5 Tata Cara Peminjaman di BMT .....	78

## Daftar Lampiran

	Halaman
Lampiran 1 Tabel Wawancara BMT Usaha Bersama I.....	92
Lampiran 2 Tabel Wawancara BMT Usaha Bersama II.....	98
Lampiran 3 Tabel Wawancara BMT Al Mujahidin.....	101
Lampiran 4 Tabel Wawancara BMT Khonsa .....	104
Lampiran 5 Tabel Wawancara Petugas BMT Usaha Bersama .....	107
Lampiran 6 Tabel Wawancara Petugas BMT Khonsa.....	111
Lampiran 7 Tabel Wawancara BMT Al Mujahidin.....	116
Lampiran 8 Tabel Wawancara Petani I.....	122
Lampiran 9 Tabel Wawancara Petani II .....	127
Lampiran 10 Tabel Wawancara Petani III.....	130
Lampiran 11 Tabel Wawancara Petani IV.....	134
Lampiran 12 Coding BMT Usaha Bersama I .....	137
Lampiran 13 Coding BMT Usaha Bersama II.....	140
Lampiran 14 Coding BMT Al Mujahidin.....	142
Lampiran 15 Coding BMT Khonsa .....	145
Lampiran 16 Coding Petugas BMT Usaha Bersama .....	147
Lampiran 17 Coding Petugas BMT Khonsa.....	149
Lampiran 18 Coding Petugas BMT Al Mujahidin .....	151

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Jawa Tengah mempunyai luas wilayah 3,25 juta hektar yang terdiri dari lahan sawah 995 ribu hektar (30,6 %) dan lahan bukan sawah 2,26 juta hektar (69,4 %). Lahan bukan sawah merupakan lahan kering, yang digunakan untuk bangunan/pekarangan, tegal, perkebunan, hutan, rawa, kolam dan sebagainya. Sebagian besar penduduk Jawa Tengah (sekitar 51 %) bekerja di sektor pertanian. (Sumastuti dalam Anonim 2008). Laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah 5,59 % dan kontribusi sektor pertanian adalah 2,78 % (Sumastuti dalam BPS, 2007). Apabila dibandingkan dengan sektor lain, sektor pertanian mempunyai kontribusi yang relatif kecil, sedangkan sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian. Potensi sektor pertanian berada di Wilayah Kabupaten. Di Jawa Tengah, dari 29 Kabupaten yang ada, 65 % (19 Kabupaten) mempunyai potensi sektor pertanian. Potensi sub sektor pertanian antar Kabupaten yang berpotensi pertanian berbeda beda, tergantung pada kondisi dan lingkungan masing-masing daerah (Sumastuti 2010)

Cilacap merupakan salah satu kota di daerah Jawa Tengah yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Hampir di setiap daerah di Kabupaten Cilacap dapat ditemui banyak sawah. Sebagian besar sawah itu ada yang merupakan sawah milik petani itu sendiri dan ada juga yang merupakan sawah milik orang lain yang dikerjakan oleh para petani. Sawah di daerah Kabupaten Cilacap sebagian besar tumbuh subur. Ini disebabkan karena tanahnya memiliki kualitas baik. Selain itu hasil padinya juga cukup baik. Sebagian besar hasil sawah di Kabupaten Cilacap ada yang

di jual di ke tengkulak ada juga yang di jual ke salah satu lembaga keuangan mikro seperti BMT (*Baitul Maal Wat Tamwil*).

Kelebihan pertanian di Cilacap dibandingkan dengan pertanian di daerah lain adalah potensi hasil taninya yang cukup besar, meskipun ada beberapa pertanian di daerah lain juga memiliki hasil atau potensi yang lebih besar. Salah satu keunikan sistem pertanian di Cilacap yaitu di mana ada beberapa petani yang menjadikan pekerjaan sebagai petani di sana hanyalah sebagai pekerjaan sampingan atau bisa dikatakan bukan sebagai pekerjaan utama. Kebanyakan petani di sana bekerja sebagai guru, pegawai kelurahan, wiraswasta dan lain lain.

Masalah utama yang di hadapi petani di Cilacap adalah masalah hasil penjualan. Petani di Cilacap harus menjual hasil panen mereka kepada para tengkulak dengan harga di bawah harga pasar. Selain itu petani juga terkendala masalah pinjaman dengan tengkulak tersebut yang mengakibatkan petani harus membayar hutangnya, dan jika mereka tidak mampu membayar maka petani harus memberikan hasil panennya kepada tengkulak atau yang biasa dikenal dengan sistem ijon. Berdasarkan penelitian sebelumnya dijelaskan bahwa kehidupan petani memang sangat tergantung dari pendapatan mereka. Setiap harinya belum tentu memperoleh uang, karena waktu menerima pendapatan tidak pasti. Jika mereka hanya mengandalkan hasil pertanian, maka hasil yang didapatkan sangat berfluktuasi tergantung dari keberhasilan panen, cuaca, biaya produksi dan harga barang hasil produksi (apakah turun, normal atau naik). Jika kondisi buruk pendapatan petani bisa minus, artinya mengalami kerugian uang yang digunakan untuk biaya produksi tidak kembali, bahkan terjerat hutang. (Satriawan dan Henny, 2012). Dalam kasus ini maka sangat penting bagi kita untuk membantu permasalahan yang sedang dihadapi oleh petani. Jika petani terus terkendala dengan masalah jual beli dan hasil produksi yang menyebabkan mereka

harus menjual hasil panennya kepada tengkulak, apalagi sampai terjerat hutang tentunya itu akan menambah permasalahan bagi petani terutama petani di Cilacap. Petani tentunya membutuhkan sebuah lembaga keuangan syariah yang dapat membantu mereka dalam mengatasi masalah di atas. Lembaga keuangan syariah yang dapat memberikan pinjaman tanpa adanya bunga yang dapat memberatkan petani dan juga menerapkan sistem bagi hasil dan lembaga itu adalah *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

BMT adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil (*syari'ah*), menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Secara konseptual, BMT memiliki dua fungsi : *Baitul Tamwil* ( *Bait* : Rumah, dan *Tamwil* : Pengembangan Harta), yaitu melakukan kegiatan pengembangan usaha usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. *Baitul Maal* (*Bait* : Rumah, *Maal* : Harta), yaitu menerima titipan dana zakat, infak dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Visi BMT mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota (ibadah dalam arti yang luas), sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT, memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Titik tekan perumusan Visi BMT adalah mewujudkan lembaga yang profesional dan dapat meningkatkan kualitas ibadah. Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, serta berkeadilan berlandaskan *syari'ah* dan diridhoi Allah SWT. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa misi BMT bukan

semata mata mencari keuntungan dan penumpukan laba modal pada golongan orang kaya saja, tetapi lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil, sesuai dengan prinsip prinsip Ekonomi Islam.

Selama beberapa dekade terakhir, modal sosial telah menjadi menarik bagi para ilmuwan sosial. Banyak artikel dan studi penelitian muncul menganalisis jaringan sosial dan mendokumentasikan efek mereka pada pertumbuhan ekonomi, kesehatan, kejahatan, kinerja pendidikan, dan bahkan kemandirian kebijakan pemerintah. Seluruh upaya upaya penelitian ini secara umum diterima bahwa modal sosial mengurangi biaya transaksi dengan mengubah hal perdagangan. Dalam transaksi berulang dengan kepercayaan dan reputasi, modal sosial menciptakan nilai-nilai intangible untuk menghilangkan atau mengurangi kebutuhan untuk pengaturan kontrak mahal. Selain itu, modal sosial menghasilkan fleksibilitas keputusan dan positif dapat mempengaruhi kinerja ekonomi dalam hal produktivitas dan pertumbuhan.

Setiap organisasi memiliki modal sosial dan dapat menggunakannya tanpa pengakuan formal keberadaannya. Sebuah perusahaan dibentuk untuk mengambil keuntungan organisasi untuk sistem pasar kerjasama fasilitasi termotivasi oleh modal sosial, yang sering beroperasi sehingga lebih efektif, dengan cara lebih murah. Peneliti Organisasi bersikeras bahwa modal sosial tidak hanya memainkan peran sentral dalam keberhasilan atau kegagalan perusahaan tetapi perusahaan itu sendiri merupakan salah satu bentuk yang paling umum dan penting dari modal sosial. Mengenai ketergantungan dan kepemilikan modal sosial, bagaimanapun, koperasi pertanian adalah sebuah organisasi yang memiliki modal sosial lebih dari organisasi bisnis lainnya. Dengan desain koperasi adalah organisasi jaringan. Hal ini dibentuk dengan motivasi saling menguntungkan dan harapan tindakan kolektif antar anggota.

Oleh karena itu koperasi pertanian adalah sebuah organisasi yang bergantung pada modal sosial dan akibatnya memiliki kelimpahan modal sosial. Meskipun ada sedikit penelitian tentang modal sosial (Desertasi oleh Sedana Gede 2013) berkaitan dengan pertanian dan belum ada studi empiris untuk mendukung argumen ini.

**Tabel 1.1**

**Rata Rata Luas Lahan yang Dikuasai per Rumah Tangga Usaha Pertanian  
Menurut Kecamatan dan Jenis Lahan di Kabupaten Cilacap Tahun 2013 (M2)**

No	Kecamatan	Lahan Bukan Pertanian		Lahan Sawah		Lahan Bukan Sawah		Jumlah		Lahan Yang Dikuasai	
		2003	2013	2003	2013	2003	2013	2003	2013	2003	2013
1	Dayeluhur	338.81	279.18	1,434.70	1,823.31	2,570.33	3,181.31	4,004.73	5,004.52	4,343.54	5,283.81
2	Wanareja	582.37	518.79	1,347.01	1,861.72	1,862.14	2,389.94	3,209.15	4,251.66	3,791.52	4,770.45
3	Majenang	452.42	296.70	927.01	1,628.32	990.20	1,498.50	1,917.21	3,126.82	2,369.63	3,423.51
4	Cimanggu	298.85	217.05	1,252.64	1,721.11	1,434.23	1,719.10	2,686.87	3,440.22	2,985.73	3,657.26
5	Karangpucung	374.49	241.37	997.16	1,308.48	2,599.54	2,378.35	3,596.70	3,686.83	3,971.19	3,928.19
6	Cipari	907.83	468.15	1,063.94	1,560.56	1,105.11	1,441.54	2,169.05	3,002.10	3,076.88	3,470.25
7	Sidareja	642.66	428.42	1,099.05	1,934.71	864.67	1,117.56	1,963.72	3,052.28	2,606.38	3,480.69
8	Kedungreja	294.10	393.40	1,960.73	2,571.65	766.04	572.52	2,726.77	3,144.16	3,020.87	3,537.56
9	Patimuan	286.64	424.01	2,716.36	3,284.11	717.84	601.10	3,434.20	3,885.22	3,720.84	4,309.22
10	Gandrungmangu	274.76	481.33	1,506.37	2,288.03	1,357.67	1,253.47	2,864.05	3,541.49	3,138.81	4,022.82
11	Bantarsari	415.03	455.21	1,277.94	2,048.07	1,238.19	1,162.52	2,516.13	3,210.58	2,931.15	3,665.79
12	Kawunganten	332.39	182.81	1,717.95	2,824.82	1,186.32	1,515.47	2,904.27	4,340.29	3,236.66	4,523.10
13	Kampung Laut	3,288.61	370.23	2,568.50	2,981.79	774.64	4,490.55	3,343.14	7,472.34	6,631.75	7,842.58
14	Jeruklegi	913.19	382.18	562.90	1,018.76	1,405.08	2,033.41	1,967.99	3,052.17	2,881.18	3,434.35
15	Kesugihan	402.22	391.67	791.82	1,531.58	622.17	740.84	1,413.99	2,272.42	1,816.21	2,664.08
16	Adipala	319.33	269.03	1,213.21	2,137.94	580.24	591.15	1,793.45	2,729.10	2,112.78	2,998.13
17	Maos	329.64	346.24	1,511.79	3,110.44	277.82	424.06	1,789.62	3,534.49	2,119.26	3,880.73
18	Sampang	528.43	214.01	1,484.14	2,352.16	171.17	390.64	1,655.31	2,742.80	2,183.74	2,956.81
19	Kroya	303.88	204.21	1,073.45	2,031.76	518.23	720.54	1,591.68	2,752.30	1,895.56	2,956.50
20	Binangun	188.15	293.35	1,769.30	2,213.56	851.14	533.93	2,620.44	2,747.49	2,808.59	3,040.84
21	Nusawungu	561.25	402.63	1,529.43	2,154.73	566.50	677.99	2,095.93	2,832.73	2,657.18	3,235.36
22	Cilacap Selatan	165.49	143.86	15.01	422.56	11.19	332.29	26.20	754.86	191.69	898.72
23	Cilacap Tengah	262.94	302.06	173.03	1,492.35	199.73	1,407.70	372.76	2,900.04	635.70	3,202.10
24	Cilacap Utara	415.46	333.33	296.76	1,316.34	111.32	601.70	408.09	1,918.04	823.55	2,251.37
<b>Cilacap</b>		<b>422.52</b>	<b>343.66</b>	<b>1,135.21</b>	<b>1,989.09</b>	<b>959.30</b>	<b>1,346.90</b>	<b>2,094.52</b>	<b>3,335.98</b>	<b>2,517.04</b>	<b>3,679.65</b>

Sumber : Berita Resmi Statistik No. 90/12/ Th. XVI, 2 Desember 2013

Hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa rata-rata penguasaan lahan yang dimiliki rumah tangga pertanian pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jika pada tahun 2003 rata-rata lahan yang dikuasai sebesar 2.517,04 m<sup>2</sup>, maka pada tahun 2013 rata-rata lahan yang dikuasai meningkat menjadi 3.679,65 m<sup>2</sup> untuk setiap rumah tangga pertanian. Peningkatan rata-rata lahan yang dikuasai terutama berasal dari peningkatan penguasaan lahan pertanian dari 2.094,52 m<sup>2</sup> pada tahun 2003 menjadi 3.335,98 m<sup>2</sup> pada tahun 2013. Sebaliknya pada penguasaan lahan bukan pertanian terjadi penurunan penguasaan lahan yang dimiliki oleh rumah tangga pertanian dari 422,52 m<sup>2</sup> pada tahun 2003 menjadi hanya 343,66 m<sup>2</sup> pada tahun 2013 (BRS, 2013)

Rata-rata penguasaan lahan per rumah tangga pertanian terbesar tahun 2013 terdapat di Kecamatan Dayeuhluhur seluas 5.283,81 m<sup>2</sup>, sedangkan rata-rata penguasaan lahan per rumah tangga terkecil terdapat di Kecamatan Cilacap Selatan seluas 898,72 m<sup>2</sup>. Kecamatan dengan rata-rata penguasaan lahan pertanian per rumah tangga terbesar adalah Kecamatan Dayeuhluhur seluas 5.004,62 m<sup>2</sup> dan Kecamatan dengan rata-rata penguasaan lahan pertanian per rumah tangga terkecil adalah Kecamatan Cilacap Selatan seluas 754,86 m<sup>2</sup>. Sementara itu, penguasaan lahan sawah terbesar terdapat di Kecamatan Patimuan sebesar 3.284,11 m<sup>2</sup> dan terkecil terdapat di Kecamatan Cilacap Selatan sebesar 422,56 m<sup>2</sup> per rumah tangga pertanian. Sedangkan untuk penguasaan lahan pertanian bukan sawah terbesar berada di Kecamatan Kampunglaut yaitu sebesar 4.490,55 m<sup>2</sup> dan terkecil berada di Kecamatan Cilacap Selatan sebesar 332,29 m<sup>2</sup> per rumah tangga pertanian (BRS, 2013).

Kondisi demografi petani menurut jenis kelamin, hasil Sensus Pertanian 2013 menunjukkan bahwa dari seluruh jumlah petani sebanyak 285.064 orang yang bekerja di sektor pertanian pada tahun 2013 didominasi oleh petani laki-laki sebesar 231.929

orang (81,36%). Sedangkan jumlah petani perempuan yang bekerja di sektor ini hanya berjumlah 53.135 orang atau sebesar 18,64 persen. Kondisi ini berlaku umum untuk komposisi petani di masing-masing subsektor pertanian baik di tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Persentase jumlah petani laki- laki terbesar berada di subsektor penangkapan ikan yang mencapai 97,44 persen sementara persentase petani laki-laki paling sedikit berada di subsektor peternakan yang mencapai 77,11 persen (BRS, 2013).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan dari lembaga keuangan mikro terhadap usaha pertanian di Kabupaten Cilacap. Penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Baitul Mal Wa’ Tamwil (BMT) Terhadap Usaha Petani di Kabupaten Cilacap (Studi Kasus : Kecamatan Cilacap Tengah)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Cilacap merupakan salah satu wilayah dengan potensi pertanian yang cukup besar. Tetapi dalam segi penjualan petani di Cilacap harus besaing dengan para tengkulak, selain itu petani di Cilacap juga terkendala masalah permodalan sehingga petani melakukan pinjaman ke BMT. BMT memang membantu petani dalam masalah permodalan, tetapi BMT sendiri terkadang mengalami masalah keuangan di mana ada beberapa petani yang terlambat dalam melakukan pengembalian. Dari uraian diatas maka muncullah beberapa pertanyaan penelitian yaitu,

1. Akad apa yang sesuai dengan petani di Cilacap untuk membantu peningkatan usaha tani yang dapat diberikan oleh Baitul Maal Wat Tamwil di Cilacap.
2. Permasalahan apa saja yang muncul di Baitul Maal Wat Tamwil yang ada di Cilacap mengenai pembiayaan usaha tani.

3. Langkah apa yang dapat ditempuh oleh Baitul Maal Wat Tamwil untuk membantu petani di Cilacap.

### **1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menganalisis akad apa yang sesuai dengan petani untuk membantu peningkatan usaha tani yang dapat diberikan oleh Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Cilacap.
2. Menganalisis permasalahan apa saja yang sering muncul Lembaga Keuangan Mikro di Kabupaten Cilacap untuk pembiayaan usaha tani.
3. Menganalisis langkah apa yang dapat ditempuh Lembaga Keuangan Mikro untuk membantu petani di Kabupaten Cilacap.

#### **1.3.2. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi ilmu pengetahuan dan pembaca diharapkan dapat menambah kajian ilmu pengetahuan mengenai pertanian dan sistem pembiayaan serta tata cara pembiayaan di Baitul Maal Wat Tamwil.
2. Bagi para petani diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup akurat mengenai pembiayaan atau akad yang sesuai dengan petani di Cilacap dalam usaha untuk peningkatan hasil pertanian.
3. Bagi Baitul Maal Wat Tamwil diharapkan dapat memberikan solusi dalam mengatasi permasalahan yang sewaktu waktu dapat terjadi di Baitul Maal Wat Tamwil terutama mengenai masalah keuangan.

4. Bagi pemerintah diharapkan dapat menetapkan kebijakan perekonomian mengenai BMT dan pertanian serta dapat meningkatkan hasil perekonomian pada sektor pertanian dan usaha mikro.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang tersusun sebagai berikut:

##### **BAB I   Pendahuluan**

Merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian.

##### **BAB II   Tinjauan Pustaka**

Merupakan telaah pustaka yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran yang digunakan.

##### **BAB III   Metode Penelitian**

Merupakan metode penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, analisis jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data dan metode analisis data yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

##### **BAB IV   Hasil dan Analisis**

Merupakan hasil dan analisis yang meliputi diskripsi objek penelitian, analisis data dan pembahasan.

##### **BAB V   Penutup**

Merupakan bab terakhir yang berisi simpulan dan saran atas dasar penelitian.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1. Landasan Teori**

##### **2.1.1. Pengertian Lembaga Keuangan Mikro**

Kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil kepada warga miskin untuk membiayai kegiatan produktif yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya (Wijono, 2005). Bank Indonesia (BI) mendefinisikan kredit mikro sebagai kredit perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak Rp 100 juta per tahun. Sementara oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) kredit mikro didefinisikan sebagai pelayanan kredit dibawah Rp 50 juta. Terdapat masih banyak lagi definisi kredit mikro atau keuangan mikro tergantung dari sudut pembicaraan (Ashari, 2006).

UNEP (2003) mendefinisikan kredit mikro adalah program pemberian kredit berjumlah kecil ke warga paling miskin untuk membiayai proyek yang dia kerjakan sendiri agar menghasilkan pendapatan, yang memungkinkan mereka peduli terhadap diri sendiri dan keluarganya. Wijono (2005) Bank Indonesia mendefinisikan kredit mikro merupakan kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha produktif baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai hasil penjualan paling banyak seratus juta rupiah per tahun. Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro umumnya disebut Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga keuangan yang terlibat dalam penyaluran kredit mikro ini umumnya disebut dengan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan LKM sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (deposits), kredit (loan),

pembayaran berbagai transaksi jasa (payment services) serta money transfer yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Dengan demikian LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro (Ashari, 2006).

### **2.1.2. Peran Lembaga Keuangan Mikro**

Bahasan tentang perekonomian pedesaan tidak dapat mengabaikan pelaku ekonomi masyarakat pedesaan yang umumnya berskala mikro dan kecil. Pemberdayaan usaha kecil dipandang akan mampu menggerakkan perekonomian pedesaan dan pada gilirannya berdampak pada tumbuhnya ekonomi nasional. Hal ini tidak terlepas dari peran usaha kecil yang strategis baik dilihat dari kualitas maupun dari segi kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. (Bank Indonesia dalam Ashari, 2006) mencatat beberapa peranan strategis dari usaha kecil tersebut, diantaranya:

1. Jumlahnya yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi.
2. Potensi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja karena setiap investasi pada sektor usaha kecil dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dibanding investasi yang sama pada usaha menengah/besar.
3. Memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku lokal dan menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau.

Wijono (2005) menunjukkan bahwa 85 persen kontribusi sektor pertanian terhadap PDB didominasi oleh unit usaha berskala kecil. Implikasinya adalah setiap langkah dalam memacu perekonomian pedesaan yang umumnya berbasis pada sektor pertanian, maka harus ada upaya memajukan usaha skala mikro/kecil. Kontribusi

usaha kecil dalam penyerapan tenaga kerja juga sangat dominan. Pada tahun 2004, jumlah tenaga kerja yang terserap di usaha kecil mencapai 70,92 juta, jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha menengah (8,15 juta) dan usaha besar (0,40 juta).

Sesuai dengan karakteristik skala usahanya, usaha mikro dan kecil tidak memerlukan modal yang terlalu besar. Dengan kebutuhan modal yang kecil tetapi dalam unit usaha yang sangat besar ini menyebabkan kurang tertariknya lembaga perbankan formal yang besar untuk mendanai usaha mikro/kecil karena transaction cost-nya sangat tinggi. Selain itu pada lembaga lembaga keuangan formal umumnya memperlakukan usaha kecil sama dengan usaha menengah dan besar dalam pengajuan pembiayaan, diantaranya mencakup kecukupan jaminan, modal, maupun kelayakan usaha (persyaratan 5-C). Persyaratan ini dipandang sangat memberatkan bagi pelaku usaha mikro/kecil dalam mengakses lembaga perbankan formal (Ashari, 2006).

### **2.1.3. Sejarah Lembaga Keuangan Mikro**

Indonesia sendiri kredit mikro sebenarnya memiliki sejarah yang panjang. Kajian historis keberadaan keuangan mikro berdasarkan catatan dapat dibagi menjadi dua periode, yakni jaman penjajahan dan jaman kemerdekaan. Selama masa penjajahan Belanda, sistem keuangan dikontrol oleh pemerintah Hindia Belanda melalui beberapa bank yang mereka dirikan (Baskara, 2013). Selanjutnya Baskara (2013) mengatakan pada akhir abad ke-19, sekitar bulan Desember 1895 atas prakarsa perorangan didirikan semacam Lembaga Perkreditan Rakyat, tercatat Raden Bei Wiriaatmadja seorang pribumi yang menjabat patih Purwokerto mendirikan "*Hulp en Spaarbank der Inlandsche Bestuurs Ambtenaren*" atau Bank Bantuan dan Tabungan Pegawai. Selanjutnya institusi tersebut diperbaiki oleh seorang Belanda bernama De

Wolf van Westerrode yang mengubahnya menjadi Bank Kredit Rakyat atau Bank Rakyat. Pendirian Bank Rakyat ini kemudian diikuti oleh daerah-daerah lain di Pulau Jawa.

Pada periode yang hampir bersamaan yakni sekitar tahun 1898, desa-desa di Jawa terutama sentra penghasil beras mendirikan Lumbung Desa yang merupakan lembaga simpan pinjam dengan menggunakan komoditas padi sebagai instrumen simpan pinjam. Seiring berkembangnya wilayah pedesaan dan juga peredaran uang semakin dikenal oleh masyarakat desa, pada tahun 1904 didirikan Bank Desa, yang selanjutnya dikenal sebagai Badan Kredit Desa (BKD) (Baskara, 2013). Bank Rakyat pada tahun 1934 digabung kedalam “*Algemene Volkscredietbank*” (AVB) yang bertujuan disamping meningkatkan kesejahteraan rakyat pedesaan melalui bantuan kredit, namun juga mencari keuntungan. Setelah kemerdekaan Indonesia AVB inilah yang berubah menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan beroperasi sebagai bank komersial yang tetap melayani masyarakat pedesaan dengan menyalurkan kredit mikro serta membuka unit-unit di pedesaan. Sehingga tidak mengherankan melihat BRI menjadi bank besar dengan cakupan jangkauan wilayah yang luas serta tetap berkomitmen dalam pemberian kredit mikro, jika kita melihat sejarah panjang pendirian bank tersebut (Baskara, 2013).

Penggabungan Bank Rakyat menjadi AVB tidak membuat Badan Kredit Desa menghentikan usahanya, namun tetap berkembang seiring dengan perkembangan jaman, namun selama masa kemerdekaan Badan Kredit Desa yang terdiri dari Bank Desa dan Lumbung Desa bertransformasi menjadi lembaga-lembaga perkreditan rakyat seperti Lembaga Perkreditan Kecamatan dan Bank Karya Produksi Desa di Jawa Barat, Badan Kredit Kecamatan di Jawa Tengah, Kredit Usaha Rakyat Kecil di Jawa Timur. Beberapa lembaga bertransformasi menjadi lembaga keuangan yang

berdasarkan ikatan adat seperti Lembaga Perkreditan Desa di Bali dan Lumbung Pithi Nagari di Sumatera Barat (Baskara, 2013).

Baskara (2013) juga mengatakan peran pemerintah Indonesia dalam pengembangan kredit mikro selama masa presiden Sukarno tidak banyak, karena pada masa-masa tersebut terjadi pergolakan politik dan juga Republik Indonesia mengalami masa perang mempertahankan kemerdekaan. Pada kurun periode 1957 sampai 1965, sistem keuangan formal sangat dikekang dengan kebijakan yang berhasil menghapuskan segala kepemilikan atau keterlibatan orang asing dalam sistem perbankan dan nasionalisasi bank bank yang dulu menjadi milik Belanda. Pada masa Presiden Suharto, setelah mulai stabilnya kondisi politik, maka pemerintah mulai menaruh perhatian besar pada pembangunan pedesaan. Pada awal periode 1970an pemerintah mendirikan bank di setiap propinsi, yang pada saat itu terdapat 27 propinsi. Pemerintah juga memberikan keleluasaan dalam mendirikan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sehingga di awal periode tersebut terdapat sekitar 300 BPR di seluruh Indonesia.

#### **2.1.4. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil***

Baskara (2013) mendefinisikan *Baitul Maal Wat Tamwil* merupakan lembaga keuangan mikro yang berdasarkan prinsip syariah dan berlandaskan ajaran Islam. Secara etimologis *Baitul Maal wat Tamwil* terdiri dari dua arti yakni *Baitul Maal* yang berarti “rumah uang” dan *Baitul Tamwil* dengan pengertian “rumah pembiayaan”. Rumah uang dalam artian ini adalah pengumpulan dana yang berasal dari *infaq*, *zakat*, ataupun *shodaqah*, dan pembiayaan yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip bagi hasil, yang berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang mendasarkan pada sistem bunga. BMT didirikan dengan tujuan meningkatkan

kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

Sejarah keberadaan BMT di Indonesia tidak lepas dari dibentuknya Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). Yayasan ini dibentuk sekitar bulan Maret tahun 1995 melalui prakarsa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) beserta Bank Muamalat yang merupakan bank pertama di Indonesia dengan prinsip syariah. Dalam susunan dewan pendiri tercatat nama B.J. Habibie, mantan presiden Indonesia. YINBUK kemudian membentuk Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) (Irwan dalam I Gde Baskara, 2013). Baskara (2013) mengatakan pendirian PINBUK dimaksudkan sebagai sarana operasional untuk menyalurkan dana yang dihimpun oleh YINBUK. Institusi inilah yang kemudian memprakarsai pembentukan BMT di Indonesia, dengan juga melakukan pembinaan, monitoring, evaluasi hingga perlindungan dalam legal status, karena status BMT yang pada saat itu belum jelas. Pada bulan Desember 1995, Presiden Suharto mendeklarasikan BMT sebagai sebuah gerakan nasional untuk pemberdayaan usaha kecil, dan di tahun tersebut BI juga mengizinkan BMT sebagai lembaga yang dapat diberikan bantuan pendanaan dan masuk dalam program *linkage* dengan bank umum. Secara operasional BMT dijalankan dengan organisasi seperti koperasi. Keanggotaan awal minimal 20 orang anggota. *Baitul Maal* memiliki prinsip sebagai penghimpun dan penyalur dana zakat, infaq dan shadaqah, dalam arti bahwa *Baitul Maal* hanya bersifat “menunggu” kesadaran umat untuk menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqahnya saja tanpa ada sesuatu kekuatan untuk melakukan pengambilan ataupun pemungutan secara langsung kepada mereka yang sudah memenuhi kewajiban tersebut. Selain sumber dana tersebut BMT juga menerima dana

berupa sumbangan, hibah, ataupun wakaf serta sumber -sumber dana yang bersifat sosial.

### **2.1.5. Sistem Pembiayaan Pada *Baitul Maal Wat Tamwil***

#### **1. *Al Musyarakah***

Antonio (2001) menjelaskan *Al Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/ *expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Pada BMT, *musyarakah* diaplikasikan dengan cara BMT menyediakan modal kepada petani untuk membeli keperluan pertanian. Kemudian petani akan mengelola sawahnya dengan modal dari BMT. Setelah panen petani mengembalikan modal bersama dengan keuntungan hasil panen yang telah disepakati sebelumnya antara petani dan BMT.

#### **2. *Al Ijarah***

Antonio (2001) menjelaskan *Al Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership/ milkiyyah*) atas barang itu sendiri. Pada BMT, *ijarah* diaplikasikan dengan cara petani menyewa alat alat pertanian, biasanya peralatan berat seperti traktor untuk digunakan petani membajak sawah. Setelah masa sewa berakhir petani wajib mengembalikan peralatan pertanian itu kepada BMT.

### **3. Al Murobahah**

Antonio (2001) mengatakan *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam akad ini, penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

### **4. Al Mudharabah**

Antonio (2001) menjelaskan *mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (nisbah) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

### **5. Bai As Salam**

Antonio (2001) menjelaskan pengertian *Bai As Salam* secara sederhana yaitu pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

### **6. Al Istinha**

Antonio (2001) menjelaskan *Istinha* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau

membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

### **7. *Al Ijarah Al Muntanahia Bit Tamlik***

Antonio (2001) menjelaskan bahwa akad ini adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Sifat pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan *ijarah* biasa.

### **8. *Al Wakalah***

Antonio (2001) menjelaskan wakalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat. Secara lebih spesifik wakalah yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal hal yang diwakilkan.

### **9. *Al Kafalah***

Antonio (2001) menjelaskan *kafalah* yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam pengertian lain *kafalah* juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.

### **10. Al Hawalah**

Antonio (2001) menjelaskan *hawalah* adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari *muhil* (orang yang berhutang) menjadi tanggungan *muhal alaih* atau orang yang berkewajiban membayar hutang.

### **11. Ar Rahn**

Antonio (2001) menjelaskan *ar rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

### **12. Al Qardh**

Antonio (2001) menjelaskan *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

### **13. Al Wadi'ah**

Antonio (2001) menjelaskan *wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

#### **14. *Al Muzaraah***

Antonio (2001) menjelaskan *muzaraah* adalah kerja sama pengelola pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (presentase) hasil panen.

## **2.2. Kajian Pustaka**

### **2.2.1. Konsep Lembaga Keuangan**

Baskara (2013) mengatakan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) jika mengacu pada Undang Undang No.1 tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro di definisikan sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan. Definisi tersebut menyiratkan bahwa LKM merupakan sebuah institusi *profit motive* yang juga bersifat *social motive*, yang kegiatannya lebih bersifat *community development* dengan tanpa mengesampingkan perannya sebagai lembaga intermediasi keuangan. Sebagai lembaga keuangan yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi, LKM juga melaksanakan kegiatan simpan pinjam, yang aktifitasnya disamping memberikan pinjaman namun juga dituntut untuk memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Kemudian Baskara (2013) juga mengatakan keuangan mikro sendiri adalah kegiatan sektor keuangan berupa penghimpunan dana dan pemberian pinjaman atau pembiayaan dalam skala mikro dengan suatu prosedur yang sederhana kepada

masyarakat miskin dan/atau berpenghasilan rendah. Secara internasional istilah pembiayaan mikro atau *microfinance* sendiri mengacu pada jasa keuangan yang diberikan kepada pengusaha kecil atau bisnis kecil, yang biasanya tidak mempunyai akses perbankan terkait tingginya biaya transaksi yang dikenakan oleh institusi perbankan. *Microfinance* merupakan pembiayaan yang bisa mencakup banyak jenis layanan keuangan, termasuk di dalamnya adalah *microcredit* atau kredit mikro, yakni jenis pinjaman yang di berikan kepada nasabah yang mempunyai skala usaha menengah kebawah dan cenderung belum pernah berhubungan dengan dunia perbankan.

### **2.2.2. Lembaga Keuangan Mikro Yang Terdapat Di Indonesia Saat Ini**

Baskara (2013) mengatakan melihat sejarah panjang keuangan mikro tersebut, tidak mengherankan jika terdapat banyak jenis lembaga keuangan mikro di Indonesia. Pelayanan keuangan mikro tidak hanya didominasi oleh lembaga namun juga banyak jenis layanan dan bantuan berupa subsidi yang dikucurkan oleh pemerintah. Hampir setiap pergantian pemerintahan meluncurkan program yang berbeda kepada masyarakat miskin dan yang berpenghasilan rendah. Hal ini menyebabkan tumpang tindihnya program, aturan dan juga kewenangan lembaga yang bergerak di bidang keuangan mikro, dan akhirnya bermuara pada susahnyanya mengukur dan mengevaluasi keberhasilan program yang ada. Keadaan ini juga menyebabkan LKM baik yang berbasis desa maupun yang terdapat di perkotaan untuk bisa menjalankan usaha mereka secara berkesinambungan, dalam arti tingkat keberlangsungan hidup LKM menjadi rendah.

Baskara (2013) mengatakan persaingan yang ketat serta tumpang tindihnya kebijakan membuat banyak LKM yang tidak mampu bersaing, sehingga harus menghentikan

usahanya atau hanya tinggal nama. Sebagai gambaran di sebuah desa di Propinsi Bali, bisa terdapat lebih dari lima hingga tujuh jenis LKM maupun bank yang menyasar segmen mikro, diantaranya LPD, KUD, Koperasi Serba Usaha (KSU) atau Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang didirikan oleh masyarakat, BPR, Teras BRI (Unit mikro BRI), dan Danamon Simpan Pinjam (DSP). Segmen pasar yang terbatas membuat membuat tiap LKM harus mampu bersaing, hal yang tentunya amat sulit bagi LKM konvensional jika harus dihadapkan dengan lembaga modern seperti bank umum dan BPR. Partisipan keuangan mikro di Indonesia bisa dibagi menjadi tiga kelompok, kelompok pertama adalah lembaga atau institusi formal dan non-formal, kelompok kedua merupakan program keuangan mikro baik yang diadakan oleh pemerintah maupun lembaga- lembaga donor dalam dan luar negeri. Ketiga adalah partisipan individu yang biasanya informal, tidak mempunyai kekuatan hukum dan menjalankan usahanya secara ilegal, dalam kelompok ini termasuk para pemburu rente seperti rentenir, ijon, gadai ilegal, kelompok arisan, dan lain lain.

### **2.2.3. Dilema Lembaga Keuangan Mikro**

Di Indonesia, muncul dilema ekonomi mikro (informal) sebagai dampak dari makin kuatnya proses modernisasi yang bergerak bias, menuju sifat-sifat yang dualistis. Bias pembangunan secara makro akan menghasilkan sistem ekonomi lain yaitu sektor informal, yang sebagian besar terjadi di negara-negara sedang berkembang. Masalah sektor informal sebenarnya menjadi semakin penting keberadaannya, namun kondisinya sangat penting. Dan membengkaknya sektor informal dikota kota besar juga sebagai akibat dari derasnya arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota-kota besar. Selama ini sektor formal dan informal berjalan dengan pertumbuhannya masing-masing. Sektor informal menjadi penyangga dari transformasi struktur ketenagakerjaan yang *unbalance*. Perlu disadari bahwa sektor

informal pun mampu memberi kontribusi yang berarti, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun kapasitas *output* nya. Sektor informal bukan hanya sebagai tempat penampungan, tetapi juga menjadi alternatif yang komplementer terhadap sektor formal (Mulyadi dalam Awami, 2009).

Awami (2009) mengatakan lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan institusi yang menyediakan jasa jasa keuangan kepada penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin. LKM ini bersifat spesifik karena mempertemukan permintaan dana penduduk miskin atas ketersediaan dana. Bagi lembaga keuangan formal perbankan, penduduk miskin akan tidak dapat terlayani karena persyaratan yang harus dipenuhi tidak dimiliki. Dikaitkan dengan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan, usaha mikro, memiliki makna yang strategis. Dilihat dari perspektif ini penguatan usaha mikro dengan wadahnya LKM berperan dalam dua saluran. Pertama, usaha mikro dapat menciptakan kesempatan kerja, hal ini disebabkan LKM relatif padat karya dengan modal yang kecil. Kedua, melalui pengembangan usaha mikro yang secara langsung terkait dengan penduduk miskin yang memiliki usaha produktif.

Awami (2009) mengatakan pelaksanaan keinginan untuk menerapkan prinsip syariah dibidang lembaga keuangan di tanah air dimulai dengan berdirinya lembaga keuangan Baitut-Tamwil yang berstatus Badan Hukum Koperasi pada tahun 1980an. Pertama kali didirikan di Bandung yaitu Koperasi *Baitut Tamwil* Jasa Keahlian Teknosa pada tanggal 30 Desember 1980 dengan akta perubahan tertanggal 21 Desember 1982. Hal ini didorong oleh keluarnya Deregulasi Perbankan Paket 1 Juni Tahun 1983, yang telah membuka belenggu penetapan bunga perbankan oleh pemerintah. Kemudian dengan dibebaskannya penentuan besar bunga kepada masing masing bank. Pendirian Bank Muamalat Indonesia ini diikuti oleh perkembangan

bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS), namun demikian adanya 2 jenis bank tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah. Oleh karena itu, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT).

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang digunakan untuk referensi dan berhubungan dengan penelitian ini antara lain :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti & Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Ashari (Potensi Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan Dan Kebijakan Pengembangannya)	Deskriptif Kualitatif	➤ Pembangunan perekonomian pedesaan masih menghadapi kendala terbatasnya modal para pelaku usahanya.
2	I Gde Kajeng Baskara (Lembaga Keuangan Mikro Di Indonesia)	Deskriptif Kualitatif	➤ Struktur masyarakat Indonesia yang amat heterogen membutuhkan lembaga keuangan yang sesuai dengan karakteristik masing masing kelompok.

3	Munene, H. Nguta dan Guyo, S. Huka (Factors Influencing Loan Repayment Default in Micro-Finance Institutions: <i>The Experience of Imenti North District, Kenya</i> )	Deskriptif Kualitatif	➤ Ada berbagai faktor yang mempengaruhi non-pembayaran kembali pinjaman yang bisa timbul dari bisnis karakteristik.
4	Tendekayivanhu Mutambanadzo, Thomas Bhiri & Smiller Makunike (An Analysis Challenges Faced By Zimbabwean Micro Finance Institution In Providing Financial Services To The Poor And Informal Sector In The Dollarized Regime)	Deskriptif Kualitatif	➤ LKM memiliki kapasitas untuk mengakses dana dari bank-bank komersial dan mereka perlu untuk menyempurnakan metode penyampaian layanan mereka dan desain produk untuk menanggapi tuntutan pasar mereka dengan cara yang cepat dan efisien, memastikan peningkatan volume usaha dan ulangi pinjaman.
5	Karel Janda & Pavel Zetek (Macroeconomic factors influencing interest rates of microfinance institutions in Latin America)	Deskriptif Kualitatif	➤ Bagian ini menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis regresi yang kuat di mana kita menggunakan Heteroscedasticity Dikoreksi Kovarian Matrix.
6	Tilahun Aemiro Tehulu	Deskriptif Kualitatif	➤ Penelitian ini

	(Determinants of Financial Sustainability of Microfinance Institutions in East Africa)		menguji faktor-faktor penentu keberlanjutan keuangan Afrika Timur LKM. Data panel tidak seimbang selama 23 LKM yang terdiri dari 121 observasi, yang mencakup periode 2004-2009, memberikan dasar untuk analisis ekonometrik.
7	Davide Forcella and Marek Hudon (Green Microfinance in Europe)	Deskriptif Kualitatif	➤ Pengelolaan lingkungan penyedia keuangan, termasuk lembaga keuangan alternatif seperti LKM, semakin di bawah pengawasan.
8	Shofia Nur Awami (Peranan Lembaga Keuangan Mikro Dan Kontribusi Kredit Terhadap Pendapatan Kotor UKM Rumah Tangga Setelah Menjadi Kreditur)	Deskriptif Kualitatif	➤ Pengajuan kredit oleh UKM rumahtangga nasabah BMT Muamalat memberikan kontribusi pendapatan kotor sebesar 9.07 persen per bulannya.
9	Ahmad Subaki, Imam Baehaqie & Faizal Ridwan Zamzany (Pengaruh Modal Sosial Terhadap Lembaga Keuangan	Deskriptif Kualitatif	➤ BMT Al-Ishlah baik kinerjanya secara organisasi, kinerja

	Mikro Syariah (LKMS) Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada LKMS Di Pondok Pesantren Al Ishlah, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat)		pembiayaan dan kinerjaserta dampak yang dirasakan oleh anggota BMT Al Ishlah dipengaruhi oleh peran kelompok, peran jaringan vertikal, peran jaringan, peran norma, peran keterpasuan dan peran kepercayaan vertical.
10	UNEP (Microfinance in the Urban Environmental Development Perspective)	Deskriptif Kualitatif	➤ Keuangan Mikro bergantung pada keyakinan bahwa semua manusia memiliki potensi untuk menjadi produktif dan menghasilkan pendapatan, jika diberi kesempatan.
11	Gede Sedana (Modal Sosial Dalam Pengembangan Agribisnis Petani Pada Sistem Subak Di Bali)	Deskriptif Kualitatif	➤ Pembangunan pertanian yang dilaksanakan pada kasus Bali selama ini kurang menekankan pada <i>local institution endowment</i> (berbasis pada kelembagaan lokal) yang telah ada.

12	Bondan Satriawan & Henny Oktavianti (Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Petani Menggunakan Model Tindakan Kolektif Kelembagaan Pertanian)	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Berdasarkan hasil analisis permasalahan pokok, terdapat 11 (sebelas) permasalahan mendasar yang menjadi penyebab kemiskinan petani. Hal tersebut antara lain: akses input pertanian terbatas, Imperfect information, ketersediaan tekno- logi terbatas, pengetahuan dan skill rendah, keterbatasan modal, moral hazard, ketidakstabilan harga, uncertainty, petani sebagai price taker, high transaction cost, management organisasi buruk, banyaknya tengkulak/pengepul sebagai price maker.</li> </ul>
13	Wiloejo Wiryo Wijono (Pemerdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan)	Deskriptif Kualitatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Upaya pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan</li> </ul>

	Nasional : Upaya Konkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan)		memutus mata rantai kemiskinan itu sendiri, antara lain dengan memperluas akses Usaha Kecil dan Mikro (UKM) dalam mendapatkan fasilitas permodalan yang tidak hanya bersumber dari lembaga keuangan formal tapi juga dari Lembaga Keuangan Mikro (LKM),
14	Efriyani Sumastuti (Potensi Sektor Pertanian di Jawa Tengah)	Deskriptif Kualitatif	➤ Pemerataan pendapatan sektor pertanian antar Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah relative merata. Potensi sektor pertanian berada di Wilayah Kabupaten. Di Jawa Tengah, dari

			29 Kabupaten yang ada, 65 % (19 Kabupaten) mempunyai potensi sektor pertanian.
--	--	--	--

## 2.4. Lembaga Keuangan Mikro Internasional

### 1. Faktor Yang Mempengaruhi Kredit Pembayaran Lembaga Keuangan Mikro di Distrik Utara Kenya.

Hasil penelitian Munene dkk (2013) mengatakan bahwa ada berbagai faktor yang mempengaruhi non pembayaran kembali pinjaman yang bisa timbul dari bisnis karakteristik. Faktor faktor ini termasuk jenis usaha, umur bisnis, jumlah karyawan dan laba usaha. Penelitian ini merekomendasikan bahwa para pemangku kepentingan di sektor keuangan mikro memastikan bahwa peminjam memiliki akses ke pelatihan yang relevan yang memadai dalam bisnis keuangan mikro.

### 2. Faktor Ekonomi Makro yang Mempengaruhi Suku Bunga Lembaga Keuangan Mikro di Amerika Latin.

Janda dan Pavel (2013) mengatakan faktor ekonomi makro yang mempengaruhi kebijakan suku bunga LKM antara tahun 2007 dan 2012 telah dianalisis dalam penelitian ini dengan maksud untuk memverifikasi apakah krisis keuangan baru baru ini yang dimulai pada tahun 2008, dan berlanjut hingga hari ini, menyebabkan perubahan dalam variabel yang diteliti sehingga perubahan suku bunga riil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menciptakan sebuah model yang menangkap sebagian besar negara negara di Amerika Latin, orang orang dengan

jumlah LKM tinggi akan melaporkan informasi yang relevan tentang bisnis mereka, dan mereka melakukannya untuk jangka waktu yang lebih lama. Demikian pula, variabel makroekonomi yang dipilih untuk penyelidikan adalah mereka yang paling mungkin terkait dengan penentuan suku bunga LKM. Ditemukan bahwa dampak akhir faktor ekonomi makro pada kebijakan suku bunga LKM secara signifikan dipengaruhi oleh pilihan untuk proxy untuk tingkat bunga.

### *3. Tantangan Lembaga Keuangan Mikro di Zimbabwe dalam Menyediakan Jasa Keuangan untuk Orang Miskin di Sektor Informal.*

Penelitian Mutambanadzo (2013) mengatakan bahwa kekurangan dana adalah kendala terbesar pertumbuhan LKM di Zimbabwe. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa persaingan, sampai batas yang lebih besar, yang berasal dari LKM lainnya. Namun persaingan dari bank umum memiliki efek baik positif maupun negatif terhadap kinerja LKM. Persaingan dari bank meningkatkan efisiensi dan memaksa LKM untuk menawarkan desain produk baru. Di sisi lain mempersempit basis pelanggan dan meningkatkan kredit macet. Keterampilan manajemen yang buruk telah dikompromikan kinerja keuangan LKM karena telah menyebabkan pengambilan keputusan yang buruk. Tidak ada papan kemerdekaan pada LKM dan ini menurunkan kinerja keuangan LKM.

### *4. Penentu Keberlanjutan Lembaga Keuangan Mikro di Afrika Timur.*

Tehulu (2013) mengatakan LKM yang terkena risiko kredit, semakin tinggi akumulasi pinjaman yang belum dibayar dan pendapatan bunga yang hilang yang mengurangi keberlanjutan keuangan LKM. Akhirnya ditemukan ukuran yang positif dan signifikan terkait dengan keberlanjutan keuangan yang mungkin karena skala

ekonomi. Hasil menunjukkan bahwa keberlanjutan keuangan LKM secara positif dan signifikan dipengaruhi oleh rasio kredit terhadap total aset kotor dan ukuran. Inefisiensi manajemen diukur dengan biaya operasional / rasio aset dan risiko kredit diukur dengan *Portfolio at risk* (PAR) lebih dari 30 hari yang ditemukan memiliki dampak negatif dan signifikan terhadap keberlanjutan keuangan LKM. Oleh karena itu, dengan mempengaruhi faktor faktor ini, LKM bisa dapat meningkatkan kesinambungan keuangan.

##### *5. Keuangan Mikro Hijau di Eropa.*

Forcella dan Marek (2014) mengatakan pengelolaan lingkungan penyedia keuangan, termasuk lembaga keuangan alternatif seperti LKM, semakin di bawah pengawasan. Sementara kinerja lingkungan telah sering dipelajari untuk penyedia keuangan tradisional, literatur diam terhadap kinerja LKM Eropa. Penelitian ini mempelajari karakteristik Eropa LKM mempengaruhi bottom line lingkungan mereka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan secara keseluruhan LKM di Eropa adalah sebanding dengan LKM yang beroperasi di negara berkembang, dengan Eropa LKM mencetak sedikit lebih baik dalam kredit hijau dan manajemen risiko lingkungan dan lebih buruk dalam kebijakan lingkungan. LKM Eropa Timur memiliki kinerja lingkungan yang lebih baik daripada rekan rekan mereka di Eropa Barat. Kedua hasil menunjukkan bahwa LKM yang memiliki kinerja lingkungan yang lebih baik tidak hanya ditemukan di negara negara kaya. Kesimpulannya, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keuangan mikro hijau di Eropa adalah sektor muda tapi juga menjanjikan dalam hal tanggung jawab sosial perbankan.

## 2.5. Pengertian Modal Sosial

Yustika (2006) mendefinisikan modal sosial adalah suatu norma atau jaringan yang memungkinkan orang untuk melakukan tindakan kolektif. Modal sosial adalah bagian bagian dari organisasi sosial seperti kepercayaan, norma dan jaringan yang dapat meningkatkan efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan tindakan yang terkoordinasi. Subaki dkk (2011) mengatakan modal sosial telah melekat dalam tatanan masyarakat utamanya masyarakat perdesaan. Oleh karena itu, dalam pengukuran modal sosial dimasukkan aspek budaya lokal yang antara lain adalah norma, kepercayaan horisontal dan vertikal, jaringan horinsotal dan vertikal, serta solidaritas horisontal dan vertikal yang mana penelitian terdahulu hanya didasarkan pada norma, kepercayaan, dan jaringan.

Subaki dkk (2011) mengatakan salah satu kebijakan publik yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas modal usaha masyarakat miskin adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga lembaga pembiayaan usaha mikro ini sebetulnya telah tumbuh cukup lama di masyarakat. Namun, kesenjangan antara permintaan dan penawaran masih cukup besar. Selain itu, fungsi intermediasi keuangan LKM di tengah masyarakat miskin kerap lebih dominan ketimbang fungsi intermediasi sosialnya. Padahal, proses intermediasi sosial memegang peranan kunci dalam pengembangan sumber daya manusia dan kapasitas kelembagaan yang membuat kelompok masyarakat miskin mempunyai kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam lembaga intermediasi keuangan formal. Situasi yang berbeda terjadi pada LKM LKM yang berbasiskan pondok pesantren. Sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan khas Indonesia, pondok pesantren diyakini mempunyai kemampuan untuk meneguhkan keterkaitan dan integrasi kelompok masyarakat. Secara umum, aktivitas LKM berbasis pondok pesantren dilandasi prinsip-prinsip *syari'ah*, sehingga dikenal

sebagai Lembaga Keuangan Mikro *Syari'ah* (LKMS). Prinsip syariah dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam yang antara lain mencakup prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), dan universalisme (*alamiyah*) serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *dzalim*, *riswah*, dan obyek haram

## **2.6. Peranan Modal Sosial Terhadap Lembaga Keuangan Mikro**

Sedana (2013) mendefinisikan modal sosial terdiri dari kepercayaan, norma sosial dan jaringan sosial berada pada kategori yang tinggi. Modal sosial memiliki pengaruh yang kuat dalam pengembangan lembaga keuangan syariah. Modal sosial terdiri dari kepercayaan, norma sosial dan jaringan sosial antara petani dengan LKM dan koperasi. Kepercayaan yang terdapat dalam LKM baik di antara petani, pengurus LKM dan koperasi tergolong tinggi. Kepercayaan yang tinggi ini merupakan suatu modal dasar yang sangat penting di dalam melakukan aktivitas kolektif yang berkenaan dengan pertanian, irigasi, sosial budaya dan agribisnis.

Subaki dkk (2011) mengatakan salah satu kebijakan publik yang ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas modal usaha masyarakat miskin adalah Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Lembaga lembaga pembiayaan usaha mikro ini sebetulnya telah tumbuh cukup lama di masyarakat. Namun, kesenjangan antara permintaan dan penawaran masih cukup besar. Selain itu, fungsi intermediasi keuangan LKM di tengah masyarakat miskin kerap lebih dominan ketimbang fungsi intermediasi sosialnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang akan digunakan untuk meneliti mengenai peranan lembaga keuangan mikro pada tingkat perekonomian petani di Kabupaten Cilacap adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Creswell (2003) mengatakan pendekatan kualitatif adalah pendekatan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif-konstruktif (misalnya, makna makna yang bersumber dari pengalaman individu, nilai nilai sosial dan sejarah, dengan tujuan untuk membangun teori atau pola pengetahuan tertentu), atau berdasarkan perspektif partisipatori (misalnya, orientasi terhadap politik, isu, kolaborasi, atau perubahan), atau keduanya. Dalam penelitian kuantitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan, sedangkan dalam penelitian kualitatif peneliti bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelas, dan berakhir dengan suatu teori.

Dalam penelitian kualitatif kali ini yang akan diteliti adalah mengenai peranan lembaga keuangan mikro dalam membantu para petani di Kabupaten Cilacap dalam usahanya untuk meningkatkan perekonomian. Subjek penelitian yang akan diteliti adalah para petani di Kabupaten Cilacap dan lembaga keuangan mikro syariah yaitu BMT.

### **3.2. Model Penelitian**

Dalam penelitian ini model yang digunakan adalah model studi kasus. Model ini memfokuskan pada kasus tertentu. Herdiansyah (2010) mendefinisikan studi kasus adalah suatu model penelitian kualitatif yang terperinci tentang individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurun waktu tertentu. Secara lebih dalam, studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehensif, intens, terperinci, dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah masalah masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer.

Pada kasus ini akan dilakukan penelitian dengan cara mengamati peranan *Baitul Maal Wat Tamwil* yang ada di Cilacap terhadap tingkat perekonomian usaha tani di Cilacap. Akan ada beberapa aspek yang akan diteliti dan diamatai dalam kasus ini, diantaranya adalah mencoba mengamati keadaan atau suasana BMT, mencoba mengamati mekanisme transaksi pembiayaan dan pinjaman yang dilakukan oleh para nasabah, serta akan dilakukan wawancara secara mendalam dengan tujuan untuk lebih memperjelas pengamatan yang sedang dilakukan.

### **3.3. Konsep Dasar Penelitian**

Pada penelitian kali ini lebih ditekankan pada bagaimana cara lembaga keuangan mikro dalam membantu petani dalam meningkatkan usaha pertaniannya. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani di Kabupaten Cilacap dengan adanya lembaga keuangan mikro tersebut. Para petani membutuhkan modal untuk meningkatkan usaha taninya. Harga peralatan pertanian yang ditawarkan oleh lembaga keuangan mikro jauh lebih murah daripada harus membeli di luar.

### **3.4. Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.4.1. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian kualitatif, kualitas instrument berkenaan dengan validitas dan reabilitas instrument dan kualitas data berkenaan ketepatan cara – cara yang digunakan untuk pengumpulan data. Oleh karena itu instrumen yang telah teruji validitas dan realibilitasnya, belum tentu dapat menghasilkan data yang valid dan reliabel, apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Instrumen dalam penelitaian kualitatif dapat berupa test, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan kuesioner.

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti terhadap instrumen meliputi validasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.

#### **3.4.2. Teknik Pengumpulan Data**

Herdiansyah (2010) mendefinisikan observasi adalah perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat langsung dilihat oleh mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Pada penelitian ini dilakukan interview pada dua sumber yaitu BMT dan petani agar didapatkan jawaban yang lebih meyakinkan pada penelitian ini.

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya karya monumental dari seseorang. Dokumen

yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar , patung, film, dan lain lain (Sugiyono, 2009). Pada penelitian ini telah dicantumkan berupa dokumentasi mengenai BMT yang diteliti dan tabel tabel tentang data jumlah pinjaman anggota di setiap BMT. Triangulasi, dalam tehnik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai tehnik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai tehnik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kreabilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai tehnik pengumpulan data dan berbagai sumber data (Sugiyono, 2009). Penelitian ini melakukan penyocokkan antara hasil wawancara yang dilakukan dengan melihat kondisi BMT yang ada di Cilacap.

### **3.5. Konsep Reliabilitas dan Validitas dalam Penelitian Kualitatif**

Herdiansyah (2010) menyatakan reliabilitas dalam penelitian kualitatif diartikan sebagai tingkat kesesuaian antara data atau uraian yang dikemukakan oleh subjek dengan kondisi yang sebanarnya. Seberapa jauhkah kesesuaian antara data yang dikemukakan oleh subjek dengan situasi konkrit yang ditemukan di lapangan. Penelitian ini menggunakan dua sumber yang berbeda yaitu BMT dan petani. Peneliti mengumpulkan keterangan beberapa petani mengenai akad yang biasa mereka gunakan dalam melakukan pembiayaan. Setelah itu, jawaban dari mereka akan dicocokkan dengan data yang ada di BMT.

Selanjutnya Herdiansyah (2010) menambahkan jika mengacu pada definisi reliabilitas yang didefinisikan sebagai keajegan atau kekonsistenan seperti yang telah

diuraikan, definisi tersebut kurang dapat diterima dalam penelitian kualitatif. Beberapa hal yang mendasari kurang dapat diterimanya konsep reliabilitas tersebut, antara lain,

1. Sifat penelitian kualitatif yang subjektif, sebagian orang masih banyak yang berpendapat bahwa objektif lebih baik dari subjektif karena objektif berarti diakui dan disepakati bersama. Sementara itu subjektif tidak dapat diakui dan disepakati bersama.
2. Situasi dan kondisi lapangan yang dinamis, dalam ilmu psikologi atau antropologi yang mengambil manusia sebagai objek studinya. Manusia selalu terkait, berinteraksi dengan lingkungan tempat ia berada. Lingkungan selalu bersifat dinamis dan berubah ubah setiap saat.
3. Hubungan interaksi antara peneliti dengan subjek yang diteliti, hubungan subjek antara peneliti dengan subjek yang diteliti merupakan salah satu faktor yang dapat menyebabkan sulitnya menentukan reliabilitas dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak perlu mengenal terlalu akrab dan dalam dengan subjek yang diteliti, sehingga intensitas dan frekuensi hubungan antara peneliti dengan subjek merupakan hal yang tidak terlalu penting.

Herdiansyah (2010) mengatakan dalam konteks penelitian ilmiah validitas sama berharganya dengan reliabilitas. Bagaikan dua sisi mata uang yang saling berdampingan, validitas dan reliabilitas mutlak diperlukan. Keduanya harus berada pada skor atau standar tersendiri yang menentukan apakah sebuah alat ukur mampu mengukur objek ukur dengan baik dan benar. Selanjutnya Neuman dalam Herdiansyah (2010) mendefinisikan validitas dapat pula diartikan sebagai kesesuaian antara alat ukur dengan sesuatu yang hendak diukur, sehingga hasil ukur

yang di dapat akan mewakili dimensi ukuran yang yang sebenarnya dan dapat dipertanggung jawabkan. Pada penelitian ini setiap jawaban dari para responden akan disesuaikan dengan kondisi yang terjadi sebenarnya.

### **3.6. Jenis dan Sumber Data**

#### **3.6.1. Data Primer**

Merupakan sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara maupun memberikan daftar pertanyaan. Adapun data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui pengisian kuesioner oleh responden yaitu adalah petani Kabupaten Cilacap terutama masyarakat di Kecamatan Cilacap Tengah, dan beberapa pihak yang berada pada lingkungan LKM daerah Cilacap. Kuesioner yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah mengenai tanggapan masyarakat mengenai pengelolaan LKM di Cilacap.

#### **3.6.2. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui studi literatur terhadap bahan-bahan pustaka dan data yang ada. Data sekunder diperoleh dengan membaca kepustakaan seperti buku-buku literatur, website internet, diktat-diktat kuliah, majalah-majalah, jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pokok penelitian, surat kabar, dan mempelajari arsip-arsip atau dokumen-dokumen yang terdapat pada instansi terkait.

### 3.7. Tahap Pengolahan Data

Ada tiga langkah pengolahan data kualitatif, yakni reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing and verification). Dalam pelaksanaannya reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi, merupakan sebuah langkah yang sangat luwes, dalam arti tidak terikat oleh batasan kronologis. Secara keseluruhan langkah langkah tersebut saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data. Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut:

1. Reduksi data (data reduction), dalam tahap ini peneliti melakukan pemilihan, dan pemusatan perhatian untuk penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh.
2. Penyajian data (data display). Peneliti mengembangkan sebuah deskripsi informasi tersusun untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Display data atau penyajian data yang lazim digunakan pada langkah ini adalah dalam bentuk teks naratif.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Peneliti berusaha menarik kesimpulan dan melakukan verifikasi dengan mencari makna setiap gejala yang diperolehnya dari lapangan, mencatat keteraturan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur kausalitas dari fenomena, dan proposisi.